



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDI IRAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB DIREKTORAT MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
JALAN
3. NHK : 677837

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.120.187.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/62 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 362.520.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 907.667.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 382.000.000
1. MOTOR, HONDA NC11BF10 A/T MODEL SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 19.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 381.989.664
F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.903.676.664
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.903.676.664

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.